



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Kemudahan Pelindungan Merek dan Pencatatan Lisensi Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Paparan Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Ir. Razilu, M.Si., CGCAE

Jakarta, 15 Agustus 2022



G20 BerAKHLAK
INDONESIA
2022



SEMAKIN
PASTI

REFORMASI
HUKUM



PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA



TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL RKP TAHUN 2022



Tema RKP Tahun 2022

“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”

PRIORITAS NASIONAL



PEMULIHAN EKONOMI

Pemulihan Daya Beli dan Usaha

- ☐ Penuntasan krisis kesehatan
- ☐ Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha
- ☐ Menjaga daya beli rumah tangga
- ☐ Percepatan Pembangunan Infrastruktur Padat Karya
- ☐ Program Khusus (prioritas arahan Presiden)

Diversifikasi Ekonomi

- ☐ Peningkatan Nilai Tambah
- ☐ Ketahanan pangan
- ☐ Pembangunan Rendah Karbon
- ☐ Peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital

REFORMASI STRUKTURAL

- ☐ Reformasi Iklim Investasi
- ☐ Reformasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perlindungan Sosial
- ☐ Reformasi Kelembagaan dan Tata Kelola



Transformasi Ekonomi Indonesia

6 Strategi Transformasi Ekonomi Indonesia (Jangka Menengah-Panjang)

- 1. Transformasi digital**
- SDM Berdaya Saing
- 3. Ekonomi Hijau**
- 4. Integrasi Ekonomi Domestik**
- Produktivitas Sektor Ekonomi
- Pemindahan IKN

PROGRAM UNGGULAN DJKI TAHUN 2022



Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- Safari Menteri Hukum dan HAM
- DJKI aktif belajar dan mengajar (OPERA/ IIPLC)
- Sertifikasi ahli penyuluh anti korupsi



Transformasi Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas

- ISO 37001:2016 (SMAP)
- ISO 9001:2015 (SMM)
- DJKI aktif mendengar untuk memberi solusi
- POP HKI (Persetujuan Otomatis Pelayanan HKI)
- Audit dan peningkatan sistem TI



Menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai Pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pendorong Kemajuan Ilmu Pengetahuan, dan Pembangunan Budaya

- PNBP berkeadilan
- *Mobile IP Clinic*
- *Drafting Patent Camp*
- *IP Market Place*
- Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI
- Penyusunan peta potensi ekonomi KIK



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Layanan DJKI

- Sinergi dan kolaborasi antar unit dengan ULP
- Percepatan Pengadaan Barang/Jasa DJKI

TANDA DAPAT
DIREPRESENTASIKAN
SECARA GRAFIS

MEMILIKI DAYA
PEMBEDA

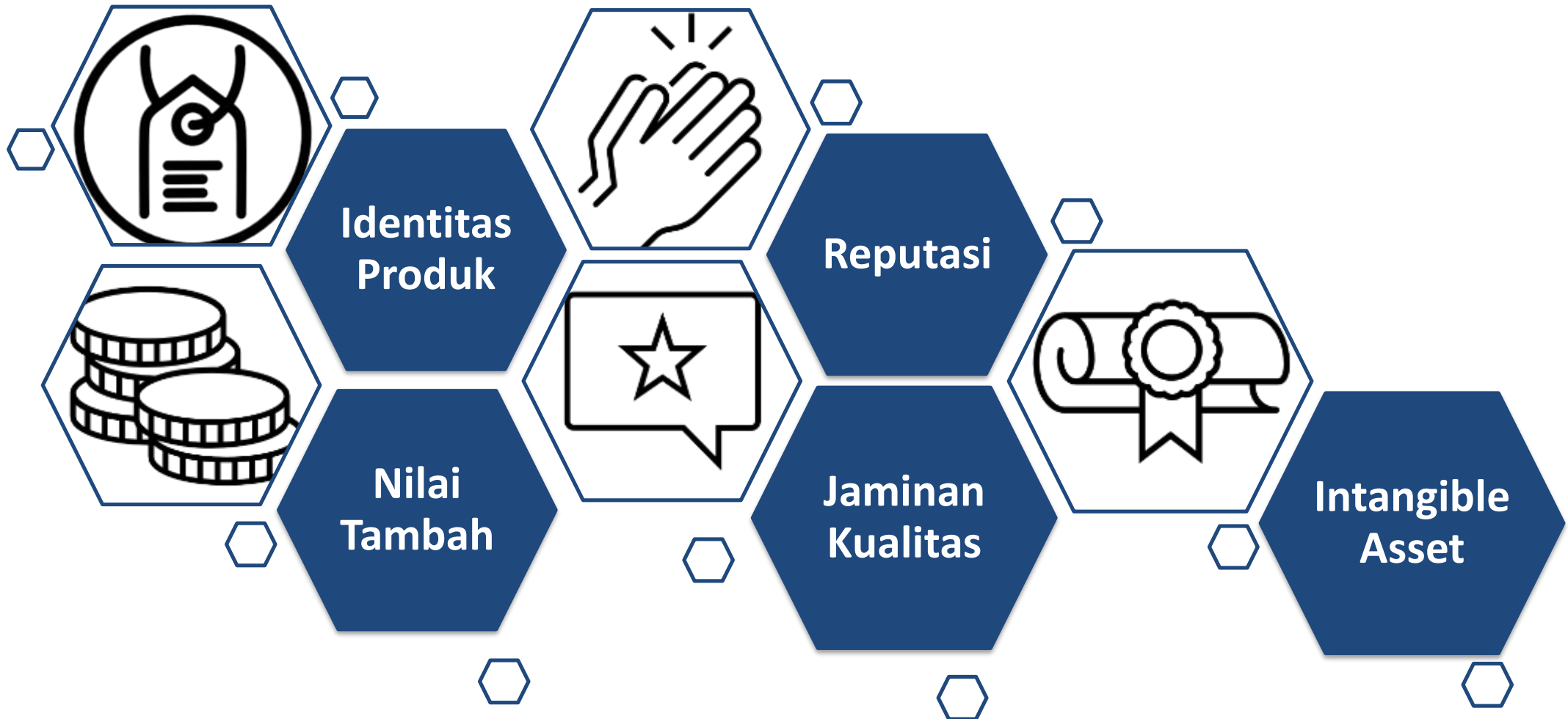
UNTUK DIGUNAKAN
DALAM KEGIATAN
PERDAGANGAN

Definisi Merek

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1
UU 20/2016



FUNGSI MEREK



FUNGSI PENDAFTARAN MEREK

Hak Eksklusif

Untuk menggunakan sendiri Merek yang didaftarkan, serta...

Hak Memberikan Izin, Mengalihkan & Menuntut



1

Hak Memberikan Izin

- ☒ Hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan secara bersama-sama Merek dalam kegiatan perdagangan.
- ☒ Hak untuk memberikan lisensi Merek Dagang/Jasa kepada pihak lain dalam kegiatan perdagangan.



2

Hak Mengalihkan

- ☒ Hak untuk mengalihkan kepemilikan merek dagang/ jasa kepada pihak lain.
- ☒ Dapat melalui jual beli, waris, hibah, wasiat, waqaf, perjanjian, sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan undang-undangan.



3

Hak Menuntut

- ☒ Hak untuk melakukan penuntutan hukum kepada pihak lain yang menggunakan Merek Dagang/ Jasa secara tanpa hak.
- ☒ Tuntutan hukum dapat secara perdata atau pidana.



ALUR PROSES PENDAFTARAN MEREK

UU NO. 20/2016

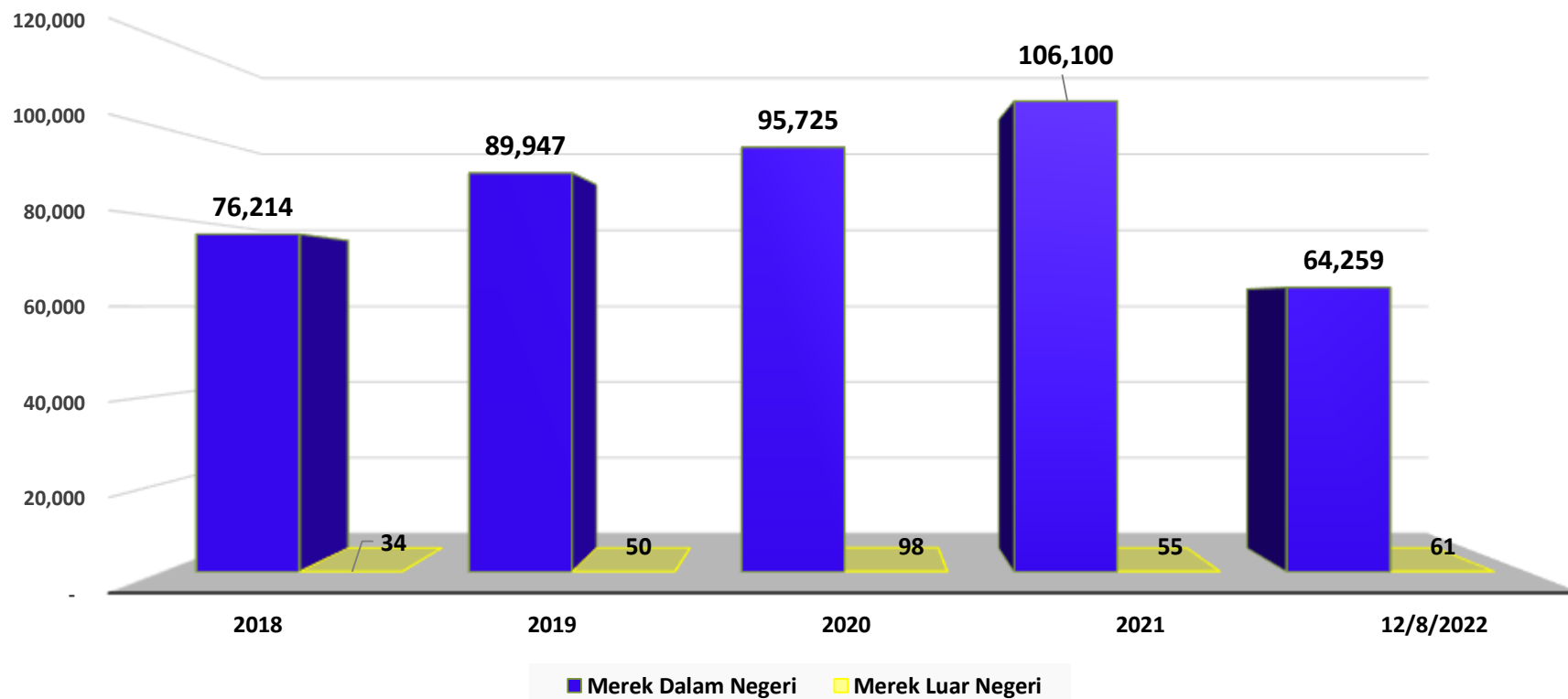


PERUBAHAN PADA UU CIPTA KERJA



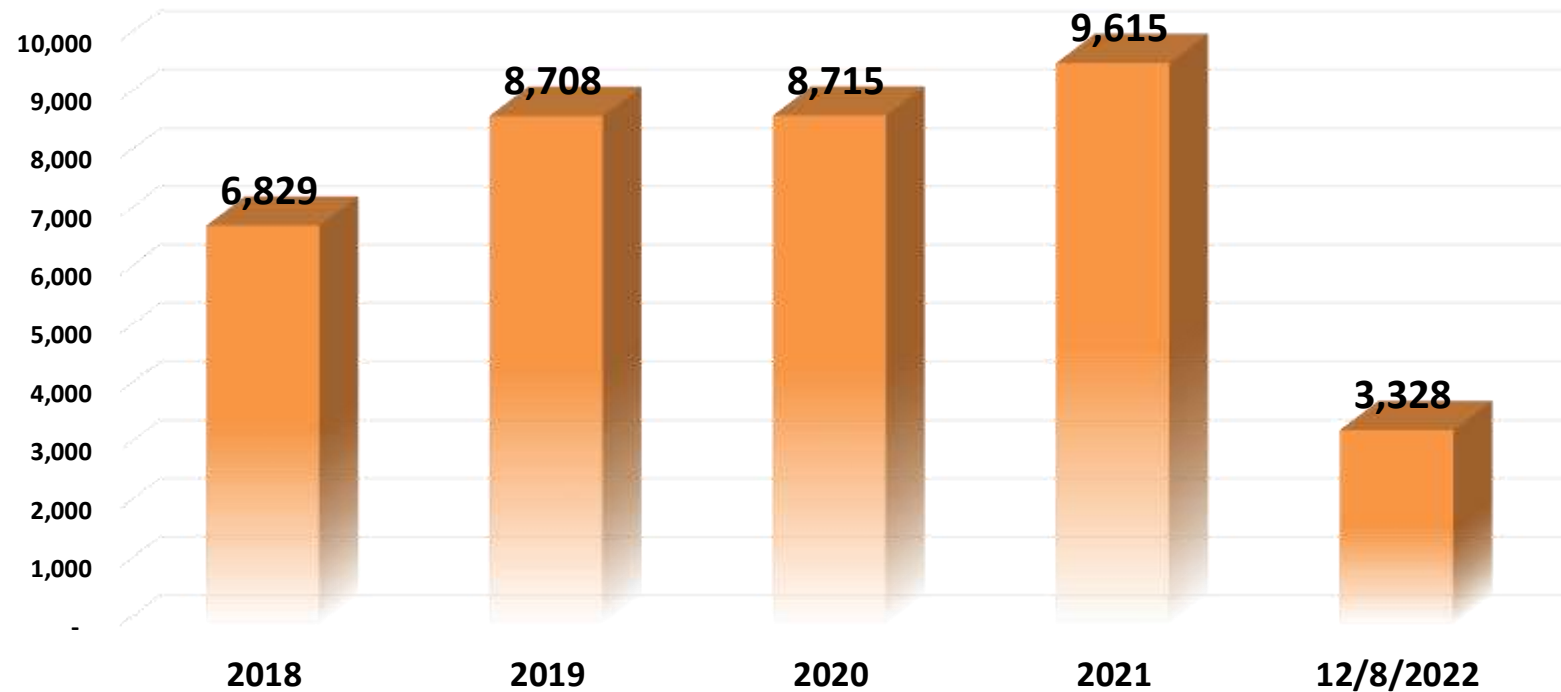
PERTUMBUHAN CAPAIAN PELINDUNGAN MEREK

Jumlah Permohonan Merek Nasional dan Permohonan Merek ke Luar Negeri



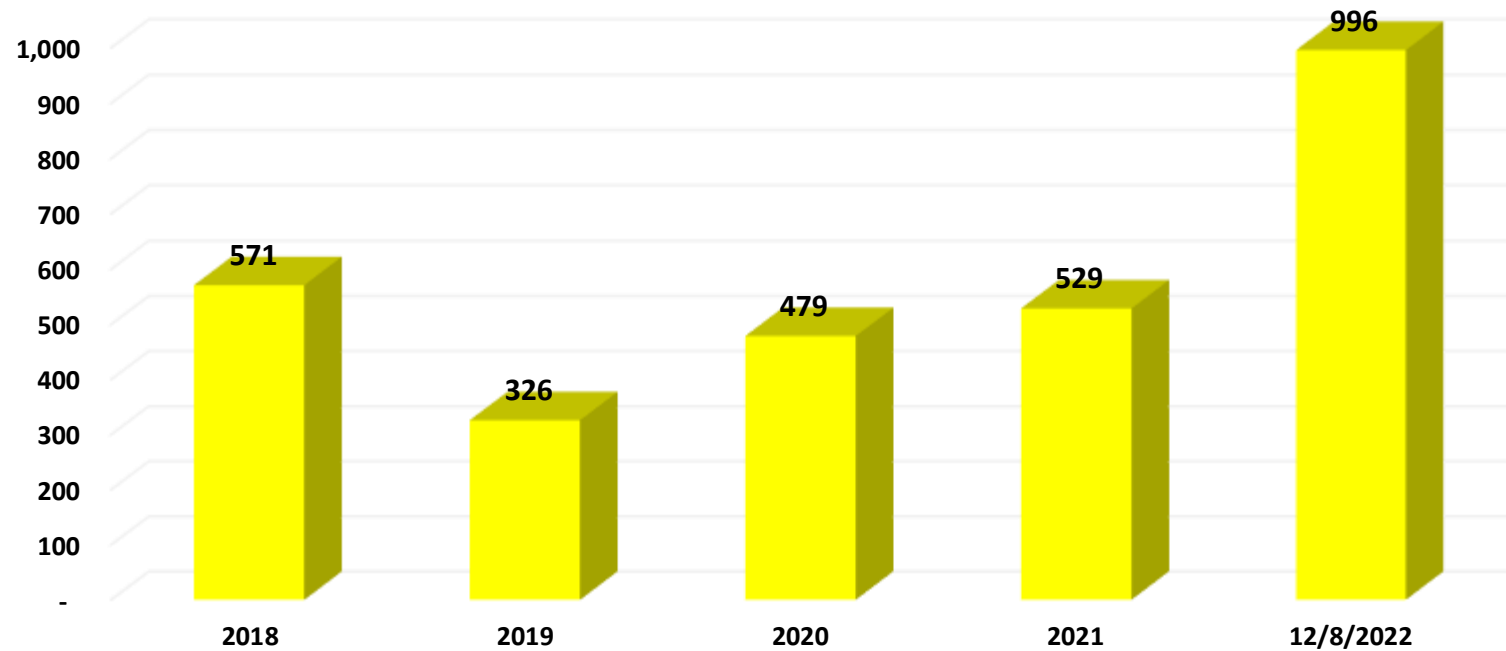
PERTUMBUHAN CAPAIAN PELINDUNGAN MEREK

PERMOHONAN MEREK LUAR NEGERI KE INDONESIA
(SISTEM MADRID)

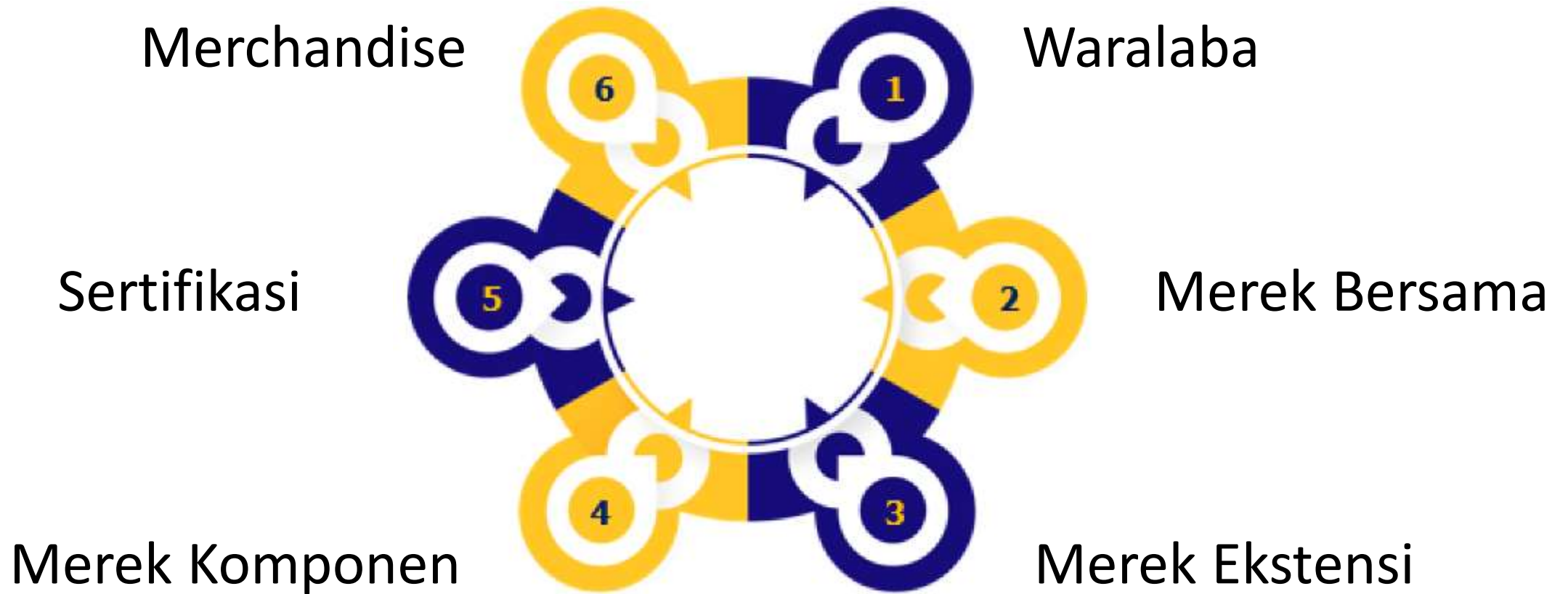


PERTUMBUHAN CAPAIAN PELINDUNGAN MEREK

JUMLAH PENCATATAN LISENSI



BENTUK LISENSI MEREK





Pendaftaran Merek ke Luar Negeri



SISTEM KONVENSIONAL

Pemohon mengajukan permohonan merek langsung ke negara-negara yang dituju dengan menggunakan konsultan kekayaan intelektual di masing-masing negara.



SISTEM MADRID

Pemohon cukup mengajukan permohonan merek di DJKI. Selanjutnya DJKI mengirimkan ke biro internasional untuk kemudian diteruskan ke negara-negara yang dituju.



KEBIJAKAN YANG AKAN DITEMPUH TAHUN 2023



**Mendukung Merek Nasional
to Global**



**Safari Menteri Hukum dan HAM RI
(Target KIK dan Kampus)**



**POP Merek (Persetujuan
Otomatisasi Pelayanan Merek)**



**One Village One Brand (Merek
dan/atau IG) yang Mendukung
Tahun 2023 sebagai Tahun Merek
(Penjajakan Kerja Sama DJKI
dengan Kantor KI Internasional:
KIPO untuk Project OVOB 2024)**

INFORMASI LENGKAP

MEDIA SOSIAL KAMI

Instagram



@DJKI.Kemenkumham

YouTube



DJKI Kemenkumham

Facebook



@DJKI.Indonesia

Twitter



@DJKI_Indonesia

Tiktok



djkikemenkumham

TERIMA KASIH

